

## BAB II

### FAKTOR CHINA DAN PERKEMBANGAN INTEGRASI EKONOMI DI ASEAN

#### II.1. Faktor China

##### II.1.1. Pertumbuhan Ekonomi China

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama satu dekade terakhir, China telah tumbuh sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru yang paling berpengaruh dalam sistem internasional. Walaupun belum dapat dikategorikan sebagai negara maju, beberapa pihak memperkirakan bahwa China, bersaing dengan Amerika Serikat, akan tumbuh sebagai negara *super-power* pada 2020. Pengaruh kekuatan ekonomi China dalam sistem internasional semakin meningkat setelah China bergabung menjadi anggota WTO (*World Trade Organization*) pada tahun 2001.<sup>62</sup> Pada tahun 2007, cadangan devisa China merupakan yang terbesar di dunia, yaitu mencapai angka 1,455 triliun USD.<sup>63</sup> Pertumbuhan ekonomi China pada tahun 2007 mencapai 11,9 persen,<sup>64</sup> dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 10,6 persen selama lima tahun terakhir.<sup>65</sup> Namun sebenarnya, pertumbuhan ekonomi China sudah relatif stabil di kisaran 10 persen per tahun sejak era 1980-an,<sup>66</sup> yaitu sejak dibukanya kawasan khusus ekspor (zona ekonomi khusus) di provinsi Guangdong dan Fujian.<sup>67</sup>

Pertumbuhan ekonomi China yang fantastis, didukung pula oleh strategi pemerintahnya untuk lebih *outward-looking*, terutama dalam aktifitas perekonomian dan perdagangan internasional. Pergeseran kondisi perekonomian China dari negara penghasil industri primer menjadi negara industri manufaktur hanya berlangsung dalam jangka waktu yang relatif singkat, 10 tahun. Pada tahun

<sup>62</sup> Financial Times, dikutip oleh Chalmers Johnson. *No Longer the 'Lone' Superpower : Coming to Terms with China*. Japan Policy Research Institute Working Paper No.105. Maret 2005. <http://www.jpri.org/publications/workingpapers/wp105.html> (diakses tanggal 7 Mei 2008).

<sup>63</sup> Tjahyo Utomo. *Terbesar di Dunia, Cadangan Devisa China US\$ 1,455 Triliun*. 2007. <http://www.media-indonesia.com> (diakses tanggal 7 Mei 2008).

<sup>64</sup> David Barboza. *China Posts 11.9 Percent Growth Rate*. International Herald Tribune. 2007. <http://www.iht.com> (diakses tanggal 7 Mei 2008).

<sup>65</sup> *China Targets Eight Percent Growth Rate in 2008*. Thaindian News. 2008. <http://www.thaindian.com> (diakses tanggal 7 Mei 2008).

<sup>66</sup> *The 6th Five-Year Plan (1981-1985)*. <http://china.org.cn/english/MATERIAL/157619.htm> (diakses tanggal 7 Mei 2008).

<sup>67</sup> Simon Saragih. *Jika Mau, Indonesia Lebih Mudah Berbalik Arah di dalam Cermin dari China*. Editor : Bagus Dharmawan. Penerbit Buku Kompas, Jakarta. 2006. p. 36.

1980, kontribusi sektor industri manufaktur China terhadap perolehan ekspor berada pada kisaran 45 persen, lebih rendah dibandingkan kontribusi sektor industri primer yang mencapai 55 persen, namun pada tahun 1990, perolehan ekspor dari sektor industri primer hanya mencapai 25 persen dan terus menurun hingga mencapai 10 persen pada tahun 2000.<sup>68</sup> China sudah tercatat sebagai produsen perangkat televisi terbesar di dunia sejak tahun 1990, produsen semen terbesar sejak 1995, serta menempati urutan tertinggi sebagai penghasil pupuk buatan dan baja pada tahun 1998.<sup>69</sup> Wibowo lebih lanjut mengemukakan bahwa ekspor produk manufaktur China dalam bidang TCF (*textile, clothing, footwear*), mainan anak-anak, dan alat olahraga cenderung mengalami penurunan, dan digantikan oleh ekspor produk-produk elektronik dan mesin.<sup>70</sup>

Beberapa pakar perdagangan internasional berpendapat bahwa sifat perdagangan ASEAN-China lebih bersifat kompetitif. Mengenai hal tersebut, Bank Dunia pada tahun 2004 telah memperkirakan bahwa China akan menjadi kompetitor utama bagi produk ekspor non-migas Indonesia, terutama untuk produk-produk tekstil, mainan anak-anak, alat olahraga, dan produk lainnya.<sup>71</sup> Namun demikian, adanya perubahan struktur industri China, seperti yang telah diungkapkan oleh Wibowo, dapat memberikan celah bagi negara-negara berkembang di ASEAN untuk terus mengembangkan usahanya, terutama yang berkaitan dengan produk manufaktur non-elektronik.

Selain Singapura, China merupakan salah satu negara Asia yang tidak terkena dampak krisis Asia 1997 secara signifikan. Penanaman modal asing di China pasca krisis Asia memang sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 1999-2000, namun kembali meningkat pada tahun 2001.<sup>72</sup> China juga merupakan negara penerima FDI (*Foreign Direct Investment*) terbesar kedua di dunia, dengan nilai investasi total (*FDI inflow*) pada tahun 2004 mencapai 60,6 milyar USD.<sup>73</sup> Aktifitas perekonomian internasional dan surplus perdagangan China sejak tahun 1990 terus mengalami peningkatan, terutama pasca

---

<sup>68</sup> Ignatius Wibowo. *Belajar dari Cina : Bagaimana Cina Merebut Peluang dalam Era Globalisasi*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta. 2005. p. 32.

<sup>69</sup> Ibid. p. 30.

<sup>70</sup> Ibid.

<sup>71</sup> Zainuddin Djafar, op.cit. p. 119.

<sup>72</sup> Ignatius Wibowo, op.cit. p. 33.

<sup>73</sup> Chengzhong Yan. *FDI from China - Situation, Obstacles and Expectations*. UNITAR (United Nations Institute for Training and Research) / SHU Series on International Economics and Finance. 2005. <http://www.unitar.org> (diakses tanggal 7 Mei 2008).

keanggotaan WTO (2001).<sup>74</sup> Dalam kegiatan perdagangannya, China mengalami defisit dengan negara-negara tetangganya (Jepang, Korea Selatan, ASEAN-5, Australia, dan India), namun mengalami surplus perdagangan yang amat signifikan dengan Amerika Serikat, Hongkong, dan Uni Eropa.<sup>75</sup> Djafar menambahkan bahwa sifat perdagangan dan ekspor China pada umumnya bersifat *low domestic value added* dan *low domestic contents*, dengan kata lain, aktifitas ekspor China sangat tergantung pula pada kegiatan impornya. Kondisi tersebut, di satu sisi memang dapat menimbulkan ketergantungan China terhadap ketersediaan (*supply*) bahan baku dari negara lain, namun di sisi lain, China telah memiliki peran yang amat penting sebagai pusat jaringan produksi global.<sup>76</sup>

Satu hal utama yang dapat dipelajari dari latar belakang kesuksesan ekonomi China adalah kemampuan pemerintahnya untuk 'menyingkirkan' isu-isu yang terkait dengan politik, militer, dan ideologi antara blok barat dan timur; serta kebijakan pemerintahnya untuk mendahulukan isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi, teknologi, dan korporasi.<sup>77</sup> Kebijakan tersebut diambil karena pemerintah China menyadari bahwa perseteruan ideologi dengan blok barat, justru dapat menghambat pembangunan ekonomi nasional. Selanjutnya China di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping mulai menekankan pentingnya *outward looking* dan lebih membuka diri terhadap negara-negara barat.

Djafar mengemukakan bahwa ada lima kebijakan penting yang selanjutnya memberikan signifikansi bagi pertumbuhan ekonomi China, yaitu (1) mendorong pembangunan *non-state enterprise* (NSE) dengan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif; (2) perusahaan-perusahaan milik negara harus tunduk pada ketentuan pemerintah, tidak memiliki hak-hak istimewa, dan menghadapi *fair competition* dengan NSE; (3) menekankan prinsip non-diskriminasi dalam memperlakukan segala sektor kegiatan perekonomian; (4) mereformasi aturan hukum yang tidak sinergis dengan prinsip-prinsip WTO; dan (5) mengutamakan prinsip ekonomi-politik, keadilan sosial, dan kepentingan umum.<sup>78</sup> Kesadaran pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan arus globalisasi

<sup>74</sup> Zainuddin Djafar, op.cit. p. 74.

<sup>75</sup> Ibid. p. 78.

<sup>76</sup> Ibid. p. 79.

<sup>77</sup> Ibid. p. 66.

<sup>78</sup> Ibid. pp. 68-69.

ekonomi, tidak menjadikan China serta-merta 'tunduk' terhadap kebijakan negara-negara barat. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah kesadaran China bahwa negara merupakan *key factor* dalam menentukan arah perekonomian nasional.<sup>79</sup>

Selain merumuskan berbagai kebijakan mendasar sebagai upaya untuk meningkatkan struktur perekonomiannya, pemerintah China juga melaksanakan reformasi di berbagai bidang dengan tetap mengedepankan peran pemerintah.<sup>80</sup> *Pertama*, melaksanakan reformasi pada berbagai badan usaha milik pemerintah (*state-owned enterprise / SOE*), yaitu antara lain dengan mentransformasi struktur tradisional SOE menjadi perusahaan modern berorientasi pasar, namun tetap memprioritaskan negara (pemerintah) sebagai pengambil keputusan utama. *Kedua*, mendorong pertumbuhan *non-state enterprise* (NSE) di tingkat kotamadya dan pedesaan sebagai motor penggerak perekonomian nasional. *Ketiga*, mengembangkan sektor UKM dengan memaksimalkan kemampuan manajerial UKM untuk mengoptimalkan pendapatan dan tingkat produktifitas. NSE bersama-sama dengan sektor UKM di China telah memainkan peranan penting sebagai akselerator perbaikan ekonomi, juga sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan basis inovasi. *Keempat*, reformasi sistem perbankan melalui restrukturisasi sistem keuangan yang konsisten, modern, dan sinergis dengan ekonomi pasar.

Dua per tiga aktifitas perekonomian China didominasi oleh sektor UKM. Sektor UKM China juga telah diakui secara internasional sebagai bagian penting dari *global supply chain*. Pesatnya pengembangan UKM di China didukung pula oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, karena hampir semua lulusan universitas di negara tersebut sangat antusias untuk turut serta secara langsung sebagai praktisi UKM.<sup>81</sup> Djafar berpendapat bahwa ada satu konsep penting mengenai perekonomian China, yaitu *matched and stimulated*. Walaupun kemajuan teknologi China belum dapat menyaingi Amerika Serikat dan Jepang, China dapat mengantisipasi perubahan sistem ekonomi internasional, dan dapat memposisikan diri dengan baik sebagai *key player* dalam perdagangan global.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> Ibid. p. 115.

<sup>80</sup> Ibid. pp. 87-100.

<sup>81</sup> Ibid. p. 57.

<sup>82</sup> Ibid. p. 60.

## II.1.2. Pengaruh China di ASEAN

China telah tumbuh sebagai salah satu partner dagang utama bagi kelompok negara ASEAN. Pada tahun 2006, total nilai perdagangan ASEAN-China mencapai 143,8 milyar USD. Pada tahun 2005, China merupakan partner dagang terbesar kelima bagi ASEAN, pasar ekspor terbesar kelima, dan sumber aktifitas impor terbesar ketiga. Persentase ekspor ASEAN ke China meningkat pesat dari 2,1 persen pada tahun 1995 menjadi 8,9 persen di tahun 2006. Pada periode tahun 2002 hingga 2006, China merupakan sumber FDI terbesar kesepuluh bagi ASEAN. Pada tahun 2001 hingga 2005, kedatangan turis asing asal China di ASEAN mencapai 13,8 juta orang, mencapai 6 persen dari total jumlah kedatangan.<sup>83</sup>

Pada tahun 2000, China mengusulkan pembentukan ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*). Pada tahun 2002, para pemimpin ASEAN beserta China menyetujui sebuah nota kesepahaman, yaitu *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation* untuk merealisasikan ACFTA secara bertahap dalam kurun waktu sepuluh tahun. Diharapkan pada 2010, *zero tariff barrier* antara ASEAN-six dan China dapat tercapai sesuai target.<sup>84</sup> Pembentukan ACFTA dikhawatirkan hanya akan mendatangkan lebih banyak 'keuntungan' bagi China. Kemampuan ASEAN untuk bersaing dengan China juga dipertanyakan karena pada dasarnya sifat perdagangan ASEAN-China bersifat kompetitif. Sebuah survey yang dilaksanakan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2001 mengenai hubungan perdagangan China-ASEAN, menyimpulkan bahwa China telah menjadi 'ancaman' bagi kawasan Asia Tenggara seiring dengan perkembangan produk-produk China yang semakin kompetitif di pasar internasional.<sup>85</sup> Sementara itu, penelitian yang sama juga telah memperkirakan bahwa iklim kompetisi di antara negara-negara ASEAN akan semakin meningkat dengan bergabungnya anggota ASEAN dalam AFTA (*ASEAN Free Trade Area*).

Pertumbuhan ekonomi yang fantastis dapat mendorong China untuk semakin berperan dalam penyediaan FDI di ASEAN. Dengan populasi 1,3 milyar

<sup>83</sup> Thomas Lum, Wayne M. Morrison, dan Bruce Vaughn, et.al. *China's "Soft Power" in Southeast Asia*. CRS Report for Congress. Congressional Research Service. 2008. <http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34310.pdf> (diakses tanggal 7 Mei 2008).

<sup>84</sup> Ibid.

<sup>85</sup> *Survey shows China becoming threat to S.E. Asian economies*. Asian Economic News. Sept 17, 2001. FindArticles.com. 07 May. 2008. [http://findarticles.com/p/articles/mi\\_m0WDP/is\\_2001\\_Sept\\_17/ai\\_79197391](http://findarticles.com/p/articles/mi_m0WDP/is_2001_Sept_17/ai_79197391).

jiwa, China juga merupakan pasar potensial bagi produk-produk dan dunia pariwisata ASEAN. Dengan neraca perdagangan yang defisit terhadap ASEAN, negara-negara ASEAN memiliki kepentingan yang sama terhadap pembukaan pasar di China. Dengan kata lain, kondisi sistem sosial-politik kawasan yang belum terintegrasi, dapat menyebabkan negara-negara ASEAN berjalan sendiri-sendiri dalam memanfaatkan *China factor* sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Di sisi lain, China juga memiliki kepentingan tersendiri terhadap ASEAN. China amat berkepentingan dengan kemajuan ekonomi ASEAN, terutama apabila ASEAN berkembang sebagai kekuatan ekonomi regional yang integratif dan antisipatif.<sup>86</sup>

Dalam menghadapi berkembangnya pasar dan pertumbuhan ekonomi China, ASEAN juga tengah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dominasi ekonomi China di kawasan Asia Tenggara.<sup>87</sup> Dominasi China perlu dicegah karena pada dasarnya, ASEAN memiliki kepentingan untuk mempertahankan daya tawar dan posisinya sebagai entitas internasional dan organisasi regional yang 'mandiri'. China dengan sigap mengantisipasi 'resistansi' ASEAN dengan menjalin kerjasama ekonomi bilateral bersama beberapa negara ASEAN.<sup>88</sup> Hal tersebut dapat mengurangi potensi integrasi ekonomi ASEAN, karena negara-negara ASEAN tentunya akan lebih memprioritaskan kerjasama ekonomi yang lebih menguntungkan secara bilateral.<sup>89</sup> Strategi tersebut juga berpotensi untuk memperkuat pengaruh China secara regional. Di satu sisi, neraca perdagangan China yang defisit terhadap ASEAN-5 memberikan manfaat tersendiri bagi ASEAN, namun ketergantungan yang berlebihan dalam menjadikan China sebagai partner dagang utama juga meningkatkan resiko dominasi China. China dikhawatirkan dapat 'mendikte' ASEAN akibat peningkatan aktifitas ekonominya di Asia Tenggara.<sup>90</sup> Dengan demikian, kepentingan ASEAN untuk mewujudkan integrasi ekonomi semakin kuat dengan hadirnya faktor China.

<sup>86</sup> Zhang Yunling, di kulip oleh Zainuddin Djafar, op.cit. pp. 45-46.

<sup>87</sup> Kompas online di dalam Zainuddin Djafar, op.cit. p. 112.

<sup>88</sup> Zainuddin Djafar, op.cit. p. 113.

<sup>89</sup> Ibid.

<sup>90</sup> Ibid.

## II.2. Perkembangan Integrasi Ekonomi ASEAN

### II.2.1. Sejarah Singkat Kerjasama Ekonomi ASEAN

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pembentukan ASEAN diprakarsai oleh lima negara anggota yang masing-masing diwakili oleh menteri luar negeri, yaitu Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Thanat Koman mewakili Thailand, Narciso Ramos dari Filipina, dan dari Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. Berdirinya ASEAN dikukuhkan dengan penandatanganan Deklarasi ASEAN yang menyatakan tujuan pembentukan ASEAN sebagai salah satu upaya untuk memperlakukan kerjasama antar negara anggota dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, serta mempromosikan stabilitas keamanan regional dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip Piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Deklarasi ASEAN juga menggarisbawahi bahwa organisasi ASEAN merupakan asosiasi yang terbuka untuk partisipasi negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara, selama negara-negara tersebut memiliki komitmen yang sama terhadap tujuan pembentukan ASEAN. Selanjutnya, lima negara di kawasan Asia Tenggara turut serta menjadi anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam pada tahun 1984, Vietnam tahun 1995, Myanmar dan Laos tahun 1997, dan Kamboja tahun 1998. Pada tahun 1997, logo ASEAN yang semula hanya mewakili lima negara anggota, masing-masing direpresentasikan oleh satu batang padi, diubah menjadi sepuluh batang padi untuk menggambarkan kesepuluh negara anggota yang berada dalam satu kawasan.<sup>91</sup>

Selama beberapa dekade terakhir, terjadi peningkatan tren regionalisme, yang bukan hanya dilatarbelakangi oleh kepentingan politik dan keamanan, namun lebih dilandaskan pada kepentingan ekonomi. Integrasi ekonomi Uni Eropa merupakan salah satu bentuk integrasi kawasan yang dipandang paling sukses dalam sistem ekonomi internasional. Pembentukan Uni Eropa dan ASEAN dilatarbelakangi oleh prinsip-prinsip yang berbeda, namun dalam menghadapi era liberalisasi dan globalisasi ekonomi, mekanisme regionalisme ala integrasi Uni Eropa seringkali diidentikkan sebagai cita-cita ASEAN. Tujuan utama pembentukan ASEAN pada mulanya merupakan salah satu upaya untuk

<sup>91</sup> Jamil Maidan Flores dan Jun Abad. Based on the first chapter of *ASEAN at 30*. Dipublikasikan dalam rangka memperingati 30 tahun berdirinya ASEAN pada 8 Agustus 1997. <http://www.aseansec.org> (diakses tanggal 22 Maret 2008).

mengukuhkan kemerdekaan masing-masing negara anggota dari kepentingan para *super power*, sekaligus melegitimasi kedaulatan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian pada awal pembentukannya, Inayati berargumen bahwa cita-cita ASEAN lebih bersifat politis, yaitu untuk memperkuat sistem pemerintahan masing-masing negara anggota tanpa mengorbankan kedaulatan nasional dan tanpa mencampuri urusan dalam negeri negara anggota lainnya, yaitu kerjasama ASEAN yang tidak harus mengintegrasikan sistem ekonomi masing-masing negara anggota ke dalam suatu sistem ekonomi regional.<sup>92</sup> Namun demikian, komitmen untuk mempertahankan tujuan tersebut cenderung semakin bergeser, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan mekanisme globalisasi ekonomi.

Komitmen para anggota ASEAN untuk bekerja sama dalam bidang ekonomi sudah dirintis sejak penandatanganan *Declaration of ASEAN Concord* oleh para Kepala Pemerintahan dan Menteri Luar Negeri ASEAN pada KTT Bali tahun 1976. Selanjutnya, wacana-wacana kerjasama ekonomi dalam berbagai bidang, mulai marak dibicarakan. Pada tahun 1977 dalam Sidang Menteri Ekonomi ASEAN III di Manila, dibentuk lima komite kerjasama ekonomi ASEAN, yaitu Komite Kerjasama Keuangan dan Perbankan (*Committee on Finance and Banking*), Komite Kerjasama Pangan, Pertanian, dan Kehutanan (*Committee on Food, Agriculture, and Forestry*), Komite Industri, Mineral, dan Energi (*Committee on Industry, Minerals, and Energy*), Komite Pengangkutan dan Komunikasi (*Committee on Transportation and Communication*), dan Komite Perdagangan dan Kepariwisata (*Committee on Trade and Tourism*). Mekanisme kerjasama ekonomi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan arus ekonomi intra-kawasan yang saling komplementer.<sup>93</sup> Namun pengimplementasian wacana tersebut berjalan lambat dan tersendat-sendat karena masing-masing anggota belum memiliki komitmen yang kuat untuk 'mengorbankan' kedaulatan dan membuka akses yang lebih besar bagi mekanisme pasar. Upaya komplementerisasi ekonomi kawasan tidak bergerak seiring dengan kecepatan globalisasi ekonomi, akibatnya, produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh negara-negara anggota ASEAN saat ini masih bersifat saling kompetitif.

<sup>92</sup> Ratna Shofi Inayati. *33 Tahun ASEAN : Keberhasilan dan Kegagalan di dalam Menuju ASEAN Vision 2020 : Tantangan dan Inisiatif*. Editor : Ganewali Wuryandari. Puslitbang Politik dan Kewilayahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2000. p. 15.

<sup>93</sup> Ibid.



Ide integrasi ekonomi ASEAN dipandang sangat ambisius apabila dibandingkan dengan rancangan dan proses pembentukan Uni Eropa yang membutuhkan waktu sekitar 40 tahun. Sejak dibentuk tahun 1967, kondisi hubungan antar negara anggota ASEAN banyak mengalami pasang surut. Komitmen-komitmen kerjasama ekonomi tidak berjalan secara optimal karena masih ada keengganan masing-masing anggota untuk 'mengorbankan' kedaulatannya demi mewujudkan liberalisasi ekonomi intra-kawasan. Dari segi kelembagaan, Akrasanee berpendapat bahwa ASEAN belum memiliki institusi khusus yang dapat menjamin pelaksanaan perjanjian-perjanjian kerjasama regional secara optimal.<sup>94</sup> Wacana integrasi ekonomi ASEAN masih belum diiringi oleh komitmen anggotanya untuk mengurangi hambatan-hambatan politis dan ideologis. Namun demikian, komitmen ASEAN untuk mewujudkan integrasi ekonomi, harus dipandang secara serius, mengingat sifat ranah ekonomi yang lebih *fluid* dibandingkan dengan situasi politik. Karena itulah, belum terarahnya sistem ekonomi kawasan secara terpadu, tidak menghalangi negara-negara anggota untuk membentuk komitmen-komitmen baru dalam kerjasama ekonomi.

Wacana pembentukan integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara juga tidak terlepas dari pengaruh krisis Asia 1997 dan *China factor*. *Domino effect* dari krisis ekonomi membuktikan bahwa suatu negara tidak dapat melepaskan diri dari saling ketergantungan dengan negara-negara lainnya. Sementara itu, AEC juga dirancang untuk meningkatkan daya saing ASEAN terhadap China, yang saat ini merupakan negara penerima FDI (*Foreign Direct Investment*) terbesar di dunia. Ketika negara-negara di dunia mulai berlomba-lomba untuk mengelompokkan diri, ASEAN juga perlu mengukuhkan keberadaannya sebagai entitas internasional yang cukup berpengaruh dalam sistem ekonomi global. Arus regionalisme yang 'dipimpin' oleh Uni Eropa cenderung mencerminkan eksklusifitas para anggotanya dari negara-negara non anggota. Mekanisme kerjasama regional ala Uni Eropa memungkinkan institusi regional untuk berperan sebagai *buffer* bagi negara-negara anggotanya dari kemungkinan krisis ekonomi.

Pada tahun 1992, negara-negara ASEAN menyepakati rencana pembentukan AFTA (*ASEAN Free Trade Agreement*) dalam kurun waktu 15

---

<sup>94</sup> Narongchai Akrasanee dan Jutamas Arunanondchai. *Institutional Reforms to Achieve ASEAN Economic Integration* di dalam Denis Hew, op.cit. p.72.

tahun, yang jatuh tempo pada 2008. Namun sebagai respon terhadap krisis Asia 1997, para pemimpin ASEAN menyetujui rencana akselerasi AFTA, yaitu pada tahun 2002 untuk enam anggota ASEAN dan perpanjangan waktu 10 tahun untuk CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam). Rencana AFTA yang semula dimaksudkan untuk menurunkan *tariff barrier* hingga mencapai 0 (nol) dan lima persen, dimaksimalkan dengan target baru, yaitu *zero tariff barrier* untuk enam negara anggota pada 2010 dan 2018 (2015 untuk mayoritas produk) bagi empat anggota baru. Soesastro menyatakan bahwa keputusan tersebut menggambarkan komitmen para negara anggota untuk meningkatkan daya saing regional.<sup>95</sup>

Pada KTT ASEAN di Bali tahun 2003, negara-negara anggota ASEAN menyepakati rencana pembentukan ASEAN *Economic Community* (AEC), ASEAN *Security Community* (ASC), dan ASEAN *Socio-Cultural Community* (ASCC) dalam kerangka ASEAN *Vision 2020*. Walaupun direncanakan secara terpisah, AEC dapat dikatakan sebagai perpanjangan yang rasional terhadap komitmen pembentukan AFTA pada tahun 1992. Komitmen ASEAN dalam pembentukan mekanisme ekonomi regional juga ditunjukkan dengan dipercepatnya rencana pembentukan Pasar Tunggal ASEAN pada tahun 2015. Namun konsep integrasi ekonomi membutuhkan komitmen yang lebih besar, karena AEC berupaya mewujudkan kawasan ASEAN dalam sebuah pasar tunggal dan basis produksi (*single market* dan *single production base*) yang menjamin kebebasan arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja ahli. AEC juga akan berupaya untuk memanfaatkan keberagaman ASEAN sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang mendorong terciptanya kawasan ASEAN yang lebih dinamis dan lebih berperan dalam rantai produksi global. Dengan demikian, pencapaian ASEAN *Economic Community* tidak dapat disandarkan sepenuhnya pada mekanisme AFTA.<sup>96</sup> AEC harus memiliki rencana yang jelas dan mandiri yang dapat menggambarkan mekanisme proses pembentukan dan progresifitas masing-masing anggota ASEAN dalam mewujudkan komitmennya masing-masing. Keraguan beberapa pihak terhadap mekanisme pembentukan ASEAN *Economic Community*, terjawab dengan ditandatanganinya Piagam

<sup>95</sup> Hadi Soesastro. *Accelerating ASEAN Economic Integration : Moving Beyond AFTA*. CSIS Economic Working Paper Series. 2005. <http://www.csis.or.id/papers/wpe091> (diakses tanggal 22 Maret 2008).

<sup>96</sup> Ibid.

ASEAN (*ASEAN Charter*) pada KTT ASEAN ke 13 yang berlangsung di Singapura tahun 2007. KTT yang menandai 40 tahun berdirinya ASEAN tersebut, dapat dikatakan sedikit terlambat, namun memiliki peranan yang cukup signifikan bagi rencana integrasi kawasan, karena KTT ASEAN ke 13 menghasilkan tiga deklarasi, yaitu cetak biru (*blueprint*) *ASEAN Economic Community*, *ASEAN Declaration on the 13th Session of the Conference on Climate Change*, dan *the 3rd Conference of Parties Serving as the Meeting of the Parties (CMP) to the Kyoto Protocol*. Piagam ASEAN diharapkan dapat menjadi *legal enforcement* bagi negara-negara anggota menuju *ASEAN Economic Community* pada tahun 2015.<sup>97</sup>

Secara khusus mengenai wacana integrasi ekonomi, pasal 5 *article 1 chapter 1* dalam Piagam ASEAN, menyebutkan bahwa salah satu komitmen ASEAN adalah :

*"To create a single market and production base which is stable, prosperous, highly competitive and economically integrated with effective facilitation for trade and investment in which there is free flow of goods, services and investments; facilitated movement of business persons, professionals, talents and labor, and freer flow of capital"*<sup>98</sup>

Pasal tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN tetap memiliki komitmen dan telah memiliki cetak biru untuk mewujudkan integrasi ekonomi, khususnya dalam kerangka *ASEAN Economic Community*.

## II.2.2. Perkembangan Wacana Pasar Tunggal ASEAN

Sesuai dengan tujuan pembentukan *ASEAN Economic Community*, *High-Level Task Force* (HLTF) para Menteri Ekonomi ASEAN dalam hal integrasi ekonomi, telah merumuskan beberapa rancangan inisiatif ekonomi untuk menyokong terwujudnya AEC. Inisiatif tersebut terdiri dari : integrasi sebelas sektor industri prioritas, penyederhanaan prosedur ekspor-impor dan kepabeanaan intra-ASEAN, eliminasi *tariff* dan *non-tariff barriers*, mempercepat

<sup>97</sup> ANTARA. *ASEAN Cetak Sejarah dengan Dilatandatanganinya Piagam ASEAN*. 2007. <http://www.antara.co.id> (diakses tanggal 22 Maret 2008).

<sup>98</sup> *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*. 2007. <http://www.aseansec.org> (diakses tanggal 13 Maret 2008).

implementasi *Mutual Recognition Arrangements* (MRA) untuk sektor-sektor industri yang menjadi prioritas, serta harmonisasi regulasi dalam kegiatan perdagangan intra-kawasan.<sup>99</sup> Menyusul Bali Concord II, KTT ASEAN ke 10 pada tahun 2004 menghasilkan *Vientienne Action Programme* (VAP), yaitu suatu perjanjian untuk menyepakati integrasi sektor-sektor industri prioritas yang terdiri atas : produk berbahan dasar kayu, otomotif, produk berbahan dasar karet, industri tekstil dan pakaian jadi, produk berbahan dasar pertanian, perikanan, elektronik, e-ASEAN, produk kesehatan, transportasi udara, dan industri pariwisata. Dengan berlakunya perjanjian tersebut, hambatan *tariff* dalam mekanisme *Common Effective Preferential Tariffs* (CEPT) untuk kesebelas sektor prioritas akan dieliminasi oleh enam negara anggota ASEAN pada 2007 dan oleh empat anggota baru (CLMV) pada 2012.<sup>100</sup> Target tersebut lebih cepat dari kesepakatan sebelumnya dalam perjanjian AFTA.

Selain menyepakati penghapusan *tariff barrier*, negara-negara anggota juga sudah memiliki komitmen untuk menelaah *non-tariff barriers* secara transparan dan selanjutnya dihapus secara bertahap. Untuk mencapai target tersebut, para anggota sudah menyepakati inisiatif-inisiatif untuk meluncurkan basis data evaluasi *non-tariff* ASEAN, merumuskan kriteria-kriteria kualifikasi yang termasuk sebagai hambatan dalam perdagangan, dan mengakomodasi perjanjian WTO (*World Trade Organization*) dalam perdagangan intra-kawasan.<sup>101</sup>

Analisis lainnya yang direkomendasikan oleh HLTF adalah dibentuknya suatu institusi yang secara efektif berperan sebagai *dispute settlement mechanism* (DSM) yang juga memiliki kewenangan secara hukum untuk menyelesaikan sengketa perdagangan intra-kawasan. Menurut Hew,<sup>102</sup> pembentukan DSM yang bebas dari aspek-aspek politik merupakan suatu wacana yang cukup sulit dilaksanakan di ASEAN. Walaupun rencana integrasi ekonomi terus bergulir, kerjasama sosial-budaya dan kerjasama 'politik' di ASEAN belum terakomodasi secara menyeluruh. Namun demikian, ditandatanganinya Piagam ASEAN pada 2007, mencerminkan komitmen yang kuat dari para negara anggota ASEAN untuk mewujudkan *ASEAN Vision 2020*.

<sup>99</sup> Denis Hew. *Introduction : Roadmap to an ASEAN Economic Community*, op. cit. pp. 1-2.

<sup>100</sup> Ibid. p. 2.

<sup>101</sup> Ibid.

<sup>102</sup> Ibid. p. 3.

Beberapa pihak memandang pesimis terbentuknya ASEAN *Economic Community*, karena konsep pasar tunggal dinilai sebagai suatu mekanisme yang terlalu ambisius bagi ASEAN, dan penerapan AEC nantinya diramalkan tidak akan lebih dari sekedar mekanisme FTA (*Free Trade Agreement*) plus. Namun di sisi lain, AFTA dapat pula dilihat sebagai katalisator dan pilar utama bagi kesuksesan AEC. Untuk mewujudkan AEC, negara-negara anggota ASEAN harus terus berupaya untuk menyukseskan sistem kerjasama ekonomi yang telah disepakati sebelumnya.<sup>103</sup> Walaupun negara-negara ASEAN memiliki tingkat pembangunan dan level industrialisasi yang berbeda, komitmen untuk mengeliminasi *tariff barrier* dalam AFTA dapat dikatakan membuahkan hasil yang cukup signifikan. Pada tahun 2002, enam negara anggota ASEAN sudah berhasil memenuhi komitmen untuk mengurangi *tariff barrier* hingga mencapai angka maksimum lima persen.<sup>104</sup> Dari kondisi tersebut, Tongzon berargumen bahwa fase pertama integrasi ekonomi ASEAN sudah terealisasi sesuai dengan target sebelumnya. Hingga tahun 2003, belum semua negara ASEAN berhasil memenuhi komitmen *zero tariff barrier* untuk 60 persen jenis produk dalam daftar CEPT-nya. Namun demikian dalam kelompok negara CLMV, target pengurangan tarif dan transfer jenis produk ke dalam daftar CEPT tetap berjalan secara konsisten, sesuai dengan kesepakatan AFTA.

Upaya pengurangan *tariff barrier* dapat dikatakan sudah optimal, namun proses eliminasi *non-tariff barrier* belum memperlihatkan kemajuan yang signifikan. Identifikasi dan klasifikasi *non-tariff barrier* masih belum transparan, mekanisme penyederhanaan proses ekspor-impor dan kepabeanan juga belum terkoordinasi dengan baik. Liberalisasi perdagangan di sektor jasa tidak berjalan seiring dengan liberalisasi barang. Proses standardisasi produk intra-kawasan juga masih dalam tahap perumusan dan tidak semua negara memiliki kualifikasi produksi yang sesuai dengan standar internasional.<sup>105</sup>

Kerjasama ekonomi di kawasan ASEAN sudah dicanangkan sejak tahun 1970-an, namun kemajuan dalam proses pelaksanaannya dapat dikatakan sangat lambat apabila dibandingkan dengan level integrasi Uni Eropa. Menurut Tongzon, kondisi tersebut disebabkan oleh ketidakhadiran institusi supranasional

<sup>103</sup> Jose L. Tongzon. *Role of AFTA in an ASEAN Economic Community* di dalam Denis Hew, op.cit. p. 128.

<sup>104</sup> Ibid. pp. 128-129.

<sup>105</sup> Ibid. p. 136-137.

yang diberikan legitimasi dan kewenangan dari para anggotanya untuk bertindak sebagai payung hukum dan pengawas dalam proses pembentukan integrasi ekonomi.<sup>106</sup> Komitmen negara-negara anggota ASEAN dalam AFTA memang memiliki dasar hukum, namun tidak ada mekanisme formal untuk menjatuhkan sanksi bagi negara anggota yang melanggar perjanjian. Dalam hal ini, keikutsertaan dan komitmen negara-negara ASEAN lebih didasarkan pada *moral obligation*. Beberapa pihak masih menganggap perlunya institusi supranasional dalam wadah kerjasama ekonomi ASEAN, karena kesuksesan integrasi ekonomi kawasan akan tergantung pada kerelaan negara anggota dalam mengorbankan kedaulatan nasional dan mengerosi prinsip non-intervensi yang selama ini menjadi landasan politik ASEAN.

Bagi lima negara anggota ASEAN, penurunan tarif dalam mekanisme CEPT tidak memiliki korelasi yang konsisten terhadap peningkatan kegiatan impor intra-ASEAN,<sup>107</sup> dan dari sudut pandang kelompok negara CLMV, penurunan tarif sama halnya dengan mengurangi pendapatan negara secara signifikan. Sebagai kelompok negara ekonomi transisi, pendapatan pemerintah CLMV masih sangat mengandalkan penerimaan retribusi yang berasal dari perdagangan internasional. Tanpa pendekatan dan kebijakan yang tepat, kelompok negara CLMV dikhawatirkan dapat menghambat proses pembentukan integrasi ekonomi ASEAN.<sup>108</sup>

Dari tahun ke tahun, kegiatan perdagangan intra-kawasan ASEAN terus mengalami peningkatan, namun hingga tahun 2005, total nilai perdagangan intra-ASEAN hanya mencakup 25 persen dari total nilai perdagangan ASEAN. Laju nilai perdagangan ASEAN dapat dilihat pada Gambar II.1. Kondisi tersebut menunjukkan kegiatan perekonomian dan perdagangan intra-kawasan ASEAN yang kurang komplementer jika dibandingkan dengan nilai perdagangan intra Uni Eropa yang mencapai 65 persen dari total nilai perdagangan kawasan.<sup>109</sup>

---

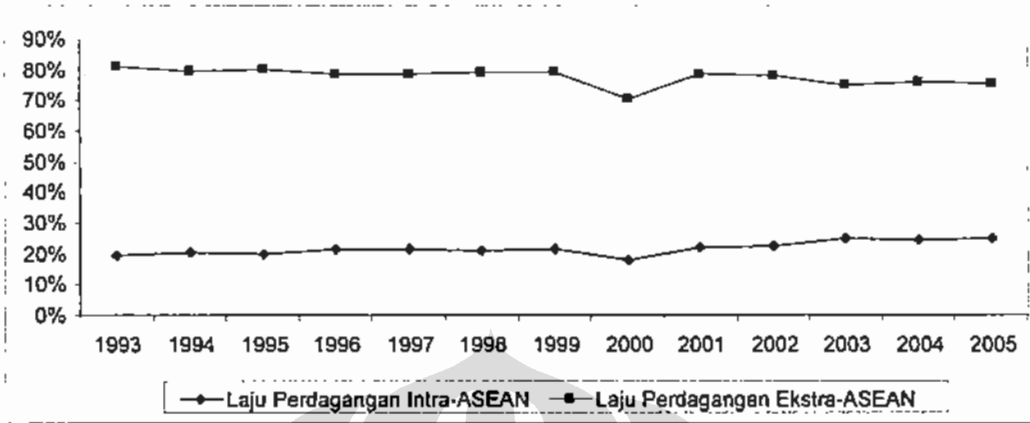
<sup>106</sup> Ibid. p. 138.

<sup>107</sup> Ibid. p. 139.

<sup>108</sup> Ibid. p. 138.

<sup>109</sup> Michael G. Plummer, *op.cit.* p. 42.

Gambar II.1. Laju Nilai Perdagangan Intra-Ekstra ASEAN (Tahun 1993-2005) <sup>110</sup>



Fase pertama dari proses integrasi ekonomi, yaitu penurunan tarif, belum diiringi oleh penghapusan hambatan non-tarif secara menyeluruh. Sementara itu dalam kegiatan perdagangan internasional, *non-tariff barrier* justru dianggap lebih 'bermasalah' karena tidak kasat mata seperti halnya *tariff barrier*. Hambatan non-tarif juga lebih sulit untuk dinegosiasikan dalam meja perundingan. Namun demikian, kondisi tersebut tidak lantas mematahkan cita-cita integrasi ekonomi, karena AEC merupakan suatu proses yang membutuhkan kesiapan para anggotanya. Berbagai penelitian dan analisis terhadap proses pembentukan AEC perlu terus dilaksanakan sebagai salah satu bentuk antisipasi terhadap dampak yang akan ditimbulkan oleh integrasi ekonomi regional terhadap perekonomian kawasan, terutama perekonomian masing-masing negara anggota.

### II.3. Kondisi Umum Perekonomian Regional ASEAN

ASEAN merupakan kawasan regional dengan tingkat diversifikasi yang tinggi, baik dari segi demografis maupun dari sudut pandang ekonomi. Rencana pembentukan integrasi ekonomi ASEAN tidak diiringi oleh upaya yang sama untuk mengatasi ketimpangan antar anggota. Kondisi ideal dalam integrasi ekonomi regional adalah situasi perekonomian yang merata dan sistem ekonomi intra-kawasan yang bersifat komplementer. Uni Eropa sebagai salah satu bentuk sukses integrasi ekonomi, juga memiliki diversifikasi dalam aspek sosial-ekonomi, namun lima belas anggota Uni Eropa yang mencanangkan integrasi

<sup>110</sup> ASEAN Statistical Yearbook 2006, op.cit.

tergolong ke dalam kelompok negara maju. Kondisi tersebut menciptakan situasi yang dapat menyokong kemajuan ekonomi negara-negara anggota lainnya yang masih tergolong negara berkembang. Sebagai gambaran, rata-rata pendapatan per kapita masyarakat ASEAN tahun 2000 adalah sebesar 1.975 USD, sementara rata-rata pendapatan masyarakat Uni Eropa sebesar 20.747 USD.<sup>111</sup> Dengan demikian, negara-negara anggota ASEAN belum tentu dapat saling menyokong antara satu dengan yang lainnya.

Kawasan ASEAN terdiri dari negara maju, negara berkembang, dan negara miskin. Bahkan sebagian anggota ASEAN belum sepenuhnya pulih dari dampak krisis Asia 1997. Singapura dan Brunei Darussalam dapat dikategorikan sebagai negara maju dengan GDP (*Gross Domestic Product*) per kapita masing-masing sebesar 26.864 USD dan 25.744 USD pada tahun 2005. Malaysia dan Thailand dapat dikategorikan sebagai NIC (*Newly Industrialized Countries*) dengan GDP per kapita masing-masing sekitar 5.250 USD dan 2.823 USD. Indonesia dan Filipina, juga dapat dikategorikan sebagai NIC, namun masih terpuruk dalam krisis ekonomi berkepanjangan. Indonesia dan Filipina memiliki tingkat GDP per kapita masing-masing sebesar 1.301 USD dan 1.157 USD pada tahun 2005. Sementara itu kelompok CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam) masih dapat dikategorikan sebagai negara miskin dengan perolehan GDP per kapita kurang dari 700 USD pada tahun yang sama.<sup>112</sup> Gambar II.2 dan II.3 masing-masing menunjukkan tingkat GDP per kapita negara ASEAN six dan GDP per kapita negara CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam).

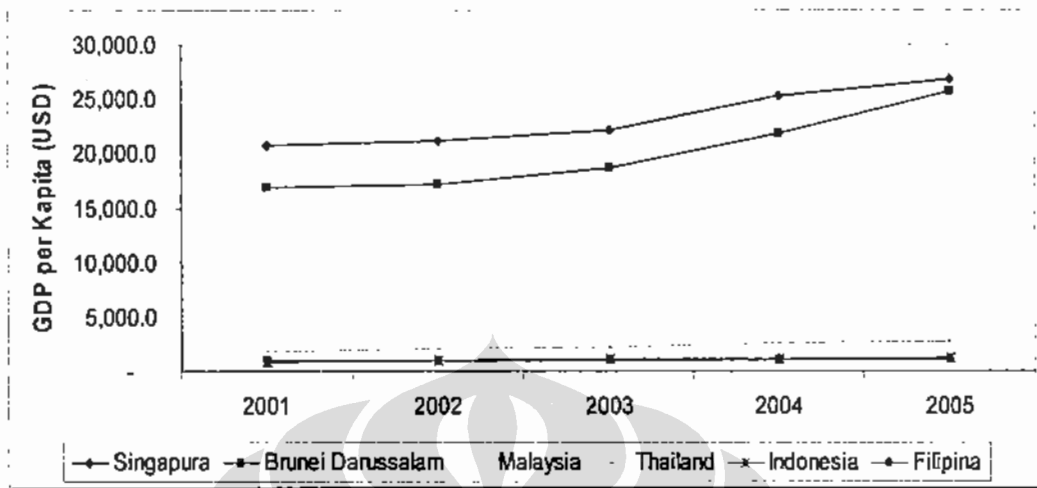
---

<sup>111</sup> Michael G. Plummer, op.cit. pp. 41-42.

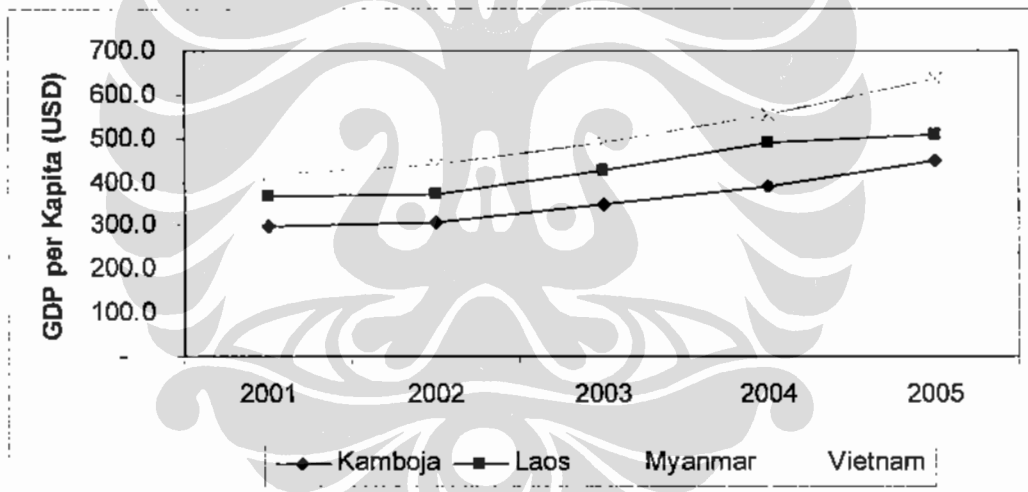
<sup>112</sup> *ASEAN Statistical Yearbook 2006*. The ASEAN Secretariat. Jakarta.



Gambar II.2. Tingkat GDP per Kapita ASEAN Six (Tahun 2001-2005)<sup>113</sup>



Gambar II.3. Tingkat GDP per Kapita Kelompok Negara CLMV (2001-2005)<sup>114</sup>



Ketimpangan ekonomi di ASEAN juga terlihat dari diversifikasi angka kemiskinan antara negara berkembang dan negara miskin. Pada tahun 2005, angka kemiskinan di Kamboja, Laos, dan Vietnam tercatat lebih dari 35 persen. Myanmar dan Filipina mencatat angka kemiskinan masing-masing sebesar 22.9 dan 24,7 persen. Angka kemiskinan di Indonesia mencapai 16 persen, sementara di Malaysia tercatat 8,1 persen.<sup>115</sup>

<sup>113</sup> Ibid.

<sup>114</sup> Ibid.

<sup>115</sup> Ibid.

Dari segi lapangan kerja, angka pengangguran di kawasan ASEAN secara regional tidak banyak mengalami perubahan. Sebagai gambaran, angka pengangguran di Indonesia cenderung meningkat, yaitu sebesar 10,3 persen pada tahun 2005.<sup>116</sup> Pendidikan dasar di kawasan ASEAN dapat dikatakan sudah terdistribusi secara merata, dengan rata-rata tingkat *enrollment* pendidikan dasar mencapai lebih dari 85 persen. Namun demikian, masih terdapat ketimpangan yang cukup besar dalam tingkat *enrollment* pada pendidikan lanjutan. Singapura dan Brunei memimpin dengan tingkat *enrollment* lebih dari 90 persen. Malaysia, Thailand, dan Vietnam, masing-masing memiliki tingkat *enrollment* sekitar 70 persen, Indonesia 64 persen, Laos 45 persen, dan Kamboja 30 persen.<sup>117</sup>

Peningkatan arus globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia tidak dapat dipisahkan dari peran teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan kemudahan bisnis dan perpindahan *capital* secara singkat. Kegiatan ekonomi global semakin *borderless* dan batas-batas politik dalam sistem ekonomi dunia semakin kurang signifikan. Situasi tersebut menyebabkan munculnya era Internet atau era *New Economy*. Keberhasilan integrasi ekonomi ASEAN dalam AEC juga akan dipengaruhi oleh efisiensi dan efektifitas telekomunikasi dan simetrisasi informasi regional. Saat ini, masih terdapat ketimpangan dalam hal kesiapan para anggota ASEAN menghadapi liberalisasi perdagangan dari segi infrastruktur telekomunikasi. Teledensitas regional di kawasan ASEAN sangat bervariasi, dimana tingkat GDP per kapita tidak selalu memiliki korelasi positif terhadap teledensitas suatu negara. Sebagai gambaran, pada tahun 2003, Singapura memiliki teledensitas tertinggi di ASEAN, yaitu sebesar 47,141 persen sementara Kamboja memiliki teledensitas terendah di kawasan, yaitu sebesar 0,249 persen. Teledensitas Indonesia adalah sebesar 3,6 persen, termasuk paling rendah diantara negara-negara ASEAN Six.<sup>118</sup> Gambar II.4 menunjukkan keragaman tingkat teledensitas negara-negara ASEAN.

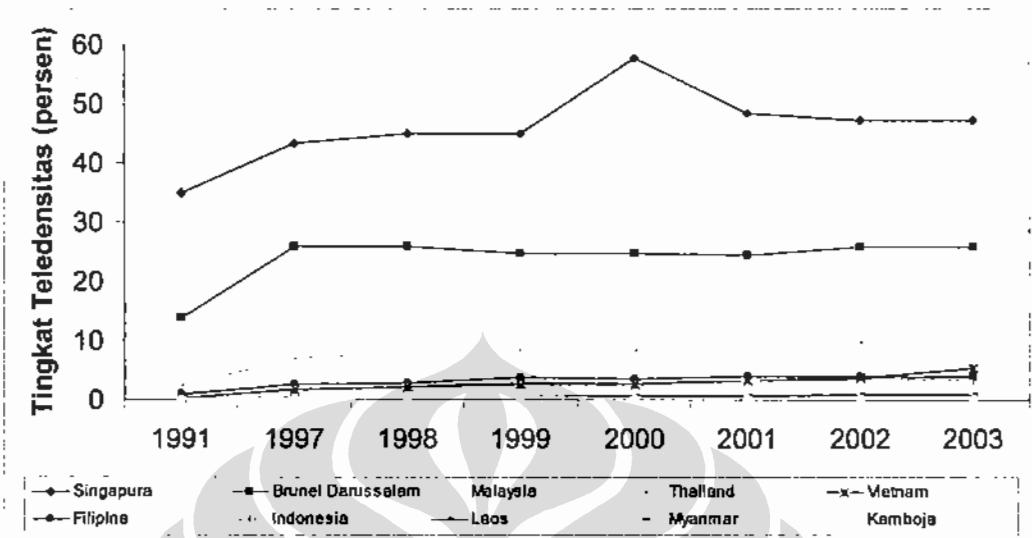
---

<sup>116</sup> Ibid.

<sup>117</sup> Ibid.

<sup>118</sup> International Telecommunication Union. <http://www.itu.int/itudoc/itu-t/com3/focus/72404.html> (diakses tanggal 31 Maret 2008)

Gambar II.4. Perbedaan Tingkat Teledensitas Negara-Negara ASEAN.<sup>119</sup>



Ketimpangan yang terjadi antar negara anggota ASEAN dapat menghambat tercapainya cita-cita integrasi ekonomi regional, karena tidak ada kepastian bahwa integrasi ekonomi akan memberikan jaminan distribusi ekonomi yang lebih merata di kawasan ASEAN. Begitu pula halnya dengan distribusi lapangan kerja, pemerataan tingkat pendidikan, dan pembangunan nasional. Dengan demikian, penerapan Pasar Tunggal dalam kerangka *ASEAN Economic Community* dapat membawa dampak sosial-ekonomi yang berbeda-beda bagi setiap negara anggota.

## II.4. Implikasi Penerapan Pasar Tunggal ASEAN

### II.4.1. Prinsip-Prinsip Utama dalam Pasar Tunggal ASEAN

Bersatunya ASEAN dalam tiga pilar *ASEAN Vision 2020*, yaitu *ASEAN Economic Community*, *ASEAN Security Community*, dan *ASEAN Socio-Cultural Community*, akan memberikan dampak perubahan yang mendasar secara regional, terutama dari sudut pandang ekonomi dan implikasinya bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat ASEAN. Konsep Pasar Tunggal ASEAN akan menciptakan pasar regional seluas 4,5 juta kilometer persegi dengan populasi

<sup>119</sup> Ibid.

lebih dari 500 juta jiwa.<sup>120</sup> Walaupun porsi perdagangan intra-ASEAN masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan perdagangan ekstra-ASEAN, yaitu 25 persen dari total nilai perdagangan ASEAN, laju perdagangan intra-kawasan cenderung meningkat dalam kurun waktu 15 tahun terakhir.

Rencana pembentukan AEC diyakini akan memberikan dampak positif bagi kemajuan perekonomian kawasan. Namun demikian, distribusi pertumbuhan ekonomi sebagai efek samping AEC, tidak dapat dipastikan akan berlangsung secara merata di setiap negara anggota. Dua konsep utama yang dirumuskan melalui AEC adalah ASEAN sebagai pasar tunggal dan sebuah basis produksi regional. Penerapan pasar tunggal ASEAN dapat diartikan sebagai terwujudnya pasar raksasa yang *borderless*, yang dilandasi oleh empat pilar utama dalam liberalisasi ekonomi, yaitu (1) kebebasan arus barang dan jasa; (2) kebebasan arus tenaga kerja ahli; (3) kebebasan dan penyamarataan sertifikat profesi bagi masyarakat ASEAN; dan (4) kebebasan arus modal.<sup>121</sup>

#### 1. Kebebasan Arus Barang dan Jasa

Implikasi positif dari keterbukaan pasar akan langsung dirasakan oleh kalangan industri MNC (*Multi National Corporation*) dan sektor Usaha Besar. Kebebasan arus barang dan jasa menjamin pergerakan barang dan jasa tanpa hambatan (atau paling tidak, dengan hambatan yang paling minimal) tarif maupun hambatan non-tarif. Pajak bea masuk, tarif, kuota, maupun hambatan non-tarif lainnya akan dieliminasi hingga mencapai *zero barrier*. Produk industri negara-negara ASEAN akan semakin bebas diperjualbelikan secara regional. Produk-produk industri yang bersifat saling kompetitif di Asia Tenggara akan terkena "seleksi alam", yaitu daya saing produk menentukan keberlangsungan industri yang bersangkutan. Sektor industri nasional yang sudah memiliki akses terhadap upaya peningkatan daya saing dapat lebih bertahan dari kemungkinan banjirnya produk asing (produk regional ASEAN) yang lebih kompetitif. Industri yang bergerak di sektor jasa juga dapat menghadapi persaingan dari sektor jasa yang berasal dari negara anggota lainnya.

---

<sup>120</sup> Overview : *Association of Southeast Asian Nations*. <http://www.aseansec.org> (diakses tanggal 22 Maret 2008).

<sup>121</sup> Noer Azam Achsani. *Integrasi Ekonomi ASEAN+3 : Antara Peluang dan Ancaman*. The Brighten Institute. <http://brighten.or.id> (diakses tanggal 20 Maret 2008).

## 2. Kebebasan Arus Tenaga Kerja Ahli

Kebebasan pergerakan tenaga kerja ahli, memungkinkan setiap pekerja profesional di ASEAN untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih luas. Namun, mekanisme AEC belum memberikan atensi yang cukup bagi tenaga kerja yang tergolong ke dalam kelompok *semi-skilled* dan *unskilled workers*, sementara masalah peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan di beberapa negara ASEAN masih berhubungan dengan kurangnya lapangan kerja bagi kelompok tenaga kerja non-ahli. Dari segi ekonomi, distribusi pendapatan yang masih asimetris dapat memicu tekanan untuk meningkatkan pergerakan tenaga kerja ke negara-negara yang menawarkan pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi.<sup>122</sup> Pergerakan tenaga kerja ke daerah atau negara-negara tertentu tanpa distribusi yang seimbang, berpotensi menimbulkan ketimpangan yang lebih jauh terhadap tingkat perekonomian negara-negara anggota. Dalam jangka panjang, kesempatan kerja secara regional akan semakin terbuka bagi tenaga profesional. Pergerakan tenaga ahli Indonesia ke luar negeri juga dapat menyebabkan kurangnya stok tenaga ahli dalam negeri (*brain-drain*).

## 3. Prinsip Penyamarataan dan Non-Diskriminasi Sertifikat Profesi

Penyamarataan sertifikasi profesi di ASEAN tanpa diskriminasi, akan membuka kesempatan bagi para profesional untuk membuka usaha (praktek kerja) keprofesian secara bebas di wilayah ASEAN. Usaha keprofesian ini diantaranya mencakup dokter, pengacara, akuntan, dan profesi lainnya. Apabila para profesional dalam negeri tidak mampu bersaing secara regional, akan berakibat semakin ketatnya persaingan dan lapangan kerja di wilayah tersebut.

## 4. Kebebasan Arus Modal

Kebebasan transaksi arus *capital* akan memberikan jaminan perpindahan modal dengan lebih leluasa di antara negara-negara ASEAN. Kebijakan tersebut bukan hanya berlaku bagi investor ASEAN, tetapi juga bagi investor asing dari negara non-ASEAN. Kondisi tersebut menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi kalangan MNC untuk menentukan lokasi produksi yang terbaik berdasarkan kebutuhan efisiensi dan efektifitas produksi. Mekanisme *single production base* akan berdampak terhadap peningkatan daya saing kawasan dalam merebut kembali peluang perolehan FDI yang saat ini didominasi oleh China. Namun

<sup>122</sup> Carunia Mulya Firdausy, *Labour Mobility within ASEAN : Issues and Policy Implications for the ASEAN Economic Community* di dalam Denis Hew, op. cit. p. 210.

demikian, mekanisme tersebut juga tidak dapat memberikan jaminan distribusi FDI secara merata.

Negara-negara anggota ASEAN memiliki level industrialisasi, tingkat pembangunan infrastruktur, serta sarana dan prasarana produksi yang berbeda-beda. Perbedaan tingkat pendidikan dan ongkos produksi juga menyebabkan produktifitas kerja di setiap negara mengalami perbedaan. Indonesia sebetulnya dapat mengambil manfaat untuk menarik lebih banyak investor karena memiliki pangsa pasar terbesar secara regional, tetapi iklim investasi Indonesia dinilai masih kurang kondusif karena kurangnya regulasi dan infrastruktur yang memadai. Walaupun memiliki pangsa pasar yang besar, biaya produksi yang tinggi menyebabkan Indonesia kurang memiliki daya saing dalam menarik minat investor. Dari ilustrasi tersebut, faktor pangsa pasar menjadi kurang signifikan bagi para investor dalam menentukan lokasi produksi, karena konsep pasar tunggal tetap menyediakan akses pasar yang sama ke seluruh kawasan regional tanpa perlu memperhitungkan faktor lokasi produksi, selama lokasi tersebut masih terletak di wilayah ASEAN. Dengan kata lain, di manapun lokasi produksi, MNC atau investor asing tetap memiliki keuntungan dari segi ketersediaan dan akses pasar, sehingga dalam penentuan lokasi produksi, aspek-aspek lain menjadi lebih berpengaruh. Kebebasan arus modal juga memungkinkan perpindahan investasi ke luar atau ke dalam negeri. Arus investasi ke dalam, akan menyediakan lapangan kerja secara massif, sementara arus investasi ke luar, di sisi lain, berpotensi meningkatkan angka pengangguran dalam negeri secara signifikan. Kebijakan negara-negara ASEAN yang lebih *FDI-oriented*, meningkatkan potensi instabilitas sosial-ekonomi akibat adanya kemungkinan perpindahan investasi dalam skala besar.

#### II.4.2. Ragam Pemahaman Terhadap Wacana Pasar Tunggal ASEAN 2015

Dalam memandang perkembangan wacana Pasar Tunggal ASEAN, terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai signifikansi ASEAN *Economic Community* (AEC) terhadap kondisi perekonomian regional. Beberapa pendapat yang optimis didasarkan pada harapan bahwa AEC akan meningkatkan level perdagangan intra-kawasan dan membantu pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota. Dari sudut pandang perdagangan internasional, memang

terdapat korelasi yang positif antara keterbukaan pasar dan pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi akan membawa peningkatan taraf hidup masyarakat, baik dari golongan ekonomi lemah, maupun bagi masyarakat umum. Dalam paham liberalisme, meningkatnya laju perdagangan merupakan salah satu indikator penting dalam mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi. Namun Abuzar Azra berpendapat bahwa masih belum ada kepastian mengenai korelasi yang positif antara integrasi dan pertumbuhan ekonomi.<sup>123</sup> Sementara itu, peningkatan kegiatan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi juga tidak menjamin adanya distribusi pendapatan yang lebih merata.<sup>124</sup>

Selain optimisme terhadap adanya peningkatan laju perdagangan kawasan, integrasi ekonomi ASEAN juga diharapkan dapat meningkatkan FDI *inflow* secara regional, karena faktor FDI tetap penting bagi negara-negara berkembang. Masuknya FDI dapat mendorong pergerakan alih teknologi, pembukaan lapangan kerja, serta pengembangan sumber daya manusia dalam peningkatan pendidikan dan keahlian. Tetapi dalam kaitannya dengan wacana integrasi ekonomi, mekanisme AEC juga tidak menjamin adanya distribusi FDI secara merata, terutama ke negara-negara kurang berkembang.

Dengan prinsip *economies of scale*, investor dapat memilih lokasi produksi berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas produksi. Dengan demikian, dampak positif dari peningkatan investasi di kawasan tidak dapat diharapkan akan dirasakan secara merata oleh setiap anggota. Negara-negara ASEAN masih memiliki banyak ketimpangan dalam hal sosial-ekonomi. Perbedaan tersebut menciptakan level kompetisi yang berbeda antar negara dalam satu kawasan. Integrasi ekonomi yang dimulai dengan ketimpangan dapat mendorong terciptanya aglomerasi aktifitas ekonomi dan terkonsentrasinya sentra-sentra produksi di area-area tertentu.<sup>125</sup>

Penghapusan *tariff barrier*, di satu sisi dapat meningkatkan laju perdagangan intra-kawasan secara signifikan, namun di sisi lain, dapat pula mengurangi potensi pendapatan negara, sehingga pemerintah tidak dapat menjamin tersedianya jaring pengaman sosial (*social safety nets*) sebagai

---

<sup>123</sup> Abuzar Azra, et.al. *ASEAN Economic Community : Implications for Poverty Reduction in Southeast Asia* di dalam Denis Hew, op.cit. p. 230.

<sup>124</sup> Ibid. p. 232-233.

<sup>125</sup> Ibid. p. 235.

peredam dampak negatif liberalisasi ekonomi bagi masyarakat miskin.<sup>126</sup> Kurang memadainya jaring pengaman sosial dapat mempengaruhi kualitas pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup masyarakat, sehingga pada akhirnya komunitas masyarakat miskin akan lebih sulit bersaing dalam era globalisasi ekonomi.

Argumentasi Abuzar Azra merefleksikan pesimisme yang cukup rasional terhadap dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh penerapan AEC, yaitu *gap* (ketimpangan) sosial-ekonomi yang lebih lebar antar negara-negara ASEAN. Pendapat serupa juga dilontarkan oleh Firdausy, yaitu bahwa peningkatan arus tenaga kerja (ahli maupun non-ahli) ke daerah-daerah dengan sarana dan kualitas hidup yang lebih baik dapat menimbulkan *gap* pendapatan yang lebih lebar secara regional. Kedua pendapat tersebut seolah-olah diperkuat oleh kurangnya komitmen para pemimpin ASEAN dalam mengupayakan pemerataan kesejahteraan sosial-ekonomi kawasan. Komitmen negara-negara ASEAN untuk menyukseskan AEC lebih merupakan *moral obligation* daripada *legal-by-law obligation*. Narongchai Akrasanee, Denis Hew, dan Jose L. Tongzon memberikan pendapat yang relatif sama, yaitu bahwa kemajuan proses pelaksanaan AEC akan berjalan sangat lambat dan tersendat-sendat karena ASEAN tidak memiliki suatu institusi supranasional yang dapat memaksa setiap negara anggota melaksanakan langkah-langkah penerapan AEC sesuai kesepakatan. Tetapi, dengan dirumuskannya *blueprint* AEC, negara-negara ASEAN memiliki kepentingan yang sama untuk menunjukkan keseriusannya dan mempertahankan citra positif negaranya di level internasional. Ketidakhadiran institusi supranasional, walaupun demikian, dapat menyulitkan upaya distribusi dan pemerataan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara. Michael Plummer menyangsikan kesuksesan penerapan AEC karena nilai perdagangan intra-kawasan ASEAN yang jauh lebih sedikit (25 persen) daripada nilai perdagangan ekstra-kawasan yang mencapai 75 persen. Fakta tersebut cenderung membuktikan pendapat bahwa sistem perekonomian intra-ASEAN belum bersifat komplementer namun masih saling kompetitif. Dengan demikian, integrasi kawasan belum tentu dapat meningkatkan laju perdagangan regional karena kompetisi intra-ASEAN akan semakin meningkat.

---

<sup>126</sup> Ibid. p. 237.



Agak berbeda dengan ulasan tersebut, Hadi Soesastro justru memberikan pendapat yang lebih optimis terhadap penyelenggaraan dan penerapan Pasar Tunggal ASEAN, yaitu bahwa ASEAN harus mempercepat proses implementasi AEC, karena konsep yang terkandung di dalamnya merupakan kelanjutan yang rasional dari penyelenggaraan AFTA. Selain itu, percepatan penerapan AEC juga diperlukan sebagai langkah untuk menyaingi pertumbuhan ekonomi China. Namun demikian, Soesastro belum sepenuhnya memberikan ulasan mengenai dampak yang dapat ditimbulkan dari penerapan AEC pada masing-masing anggota sehubungan dengan terdapatnya *gap* sosial-ekonomi antar negara. Soesastro juga menekankan perlunya suatu cetak biru AEC yang berfungsi untuk mengidentifikasi tujuan utama pembentukan AEC dan disertai dengan acuan (kerangka) proses penerapan AEC. Perumusan *blueprint* AEC pada 2007 tampaknya mendukung optimisme tersebut.

Dari berbagai pendapat mengenai dampak penerapan AEC terhadap perekonomian regional, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa pro dan kontra dalam memandang konsep Pasar Tunggal ASEAN dilatarbelakangi oleh prinsip-prinsip yang berbeda. Di satu sisi, integrasi ekonomi merupakan suatu kebutuhan yang telah disepakati oleh negara-negara ASEAN. Arus globalisasi, dorongan untuk melakukan liberalisasi perdagangan, dan meningkatnya iklim kompetisi internasional, telah memberikan dorongan bagi negara-negara di dunia untuk bergabung dalam satu kelompok (*cluster*) tertentu. Regionalisme dipilih karena negara-negara dalam satu kawasan pada umumnya memiliki karakteristik sosial-budaya yang tidak jauh berbeda antara satu dengan lainnya. Namun di sisi lain, integrasi ekonomi yang dibangun di atas pondasi *disparity* dan perbedaan *level playing field*, berpotensi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang asimetris. Untuk meredam dampak negatif yang mungkin timbul dari integrasi ekonomi kawasan, diperlukan komitmen regional untuk mengatur arus distribusi pendapatan yang lebih merata. Sementara itu dalam level domestik, dibutuhkan kebijakan nasional yang tepat sasaran untuk meningkatkan daya saing negara secara individu.

## II.5. Perlunya Langkah Antisipatif dalam Menghadapi Liberalisasi Perdagangan

### II.5.1. Strategi Domestik dalam Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN

Dalam menghadapi era Pasar Tunggal, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa indeks daya saing Indonesia pada tahun 2001 merupakan yang terendah di kelompok negara ASEAN six.<sup>127</sup> Biaya produksi di Indonesia tergolong tinggi namun tidak diiringi oleh kondisi infrastruktur dan pelayanan administrasi yang kompeten. Perhatian pemerintah Indonesia dalam menghadapi Pasar Tunggal ASEAN masih difokuskan pada kalangan korporasi dan usaha besar. Sementara itu, tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam penerapan Pasar Tunggal ASEAN adalah banjirnya produk (dan jasa) impor yang lebih kompetitif di pasar dalam negeri. Kelompok usaha yang dapat langsung terpengaruh adalah sektor UKM dan sektor usaha informal yang selama ini mengandalkan pasar domestik sebagai target pemasaran.

Sebagai langkah antisipatif untuk meredam dampak negatif dari integrasi ekonomi regional, dibutuhkan solusi ekonomi alternatif mandiri yang dapat mempertahankan stabilitas sosial-ekonomi masyarakat. Soesastro<sup>128</sup> berargumen bahwa sektor UKM dapat memiliki peran penting dalam menyukseskan konsep *single production base* di ASEAN dengan memanfaatkan *linkage* antara MNC dan industri dalam negeri. Di sisi lain, sektor UKM juga memiliki peranan penting sebagai stabilisator sosial-ekonomi masyarakat. Sebagai gambaran, sektor UKM merupakan basis massa yang sangat besar (sekitar 90 persen jenis usaha di dunia termasuk ke dalam sektor UKM) dan lebih dari 90 persen lapangan kerja di dunia juga disumbangkan oleh sektor UKM.

Untuk menciptakan sektor UKM yang lebih kompetitif di level regional, pemerintah Indonesia dapat mengambil pelajaran dari strategi pemerintah Thailand dan Malaysia dalam mengembangkan sektor UKM-nya masing-masing. Thailand dan Malaysia memiliki visi dan misi yang jelas dalam pengembangan UKM. Daya saing sektor UKM di kedua negara tersebut juga sudah diakui secara internasional berkat strategi (kebijakan) yang unik dan tepat sasaran.

<sup>127</sup> Institute of Policy Studies, *Annual IPS ASEAN 9+1 Competitiveness Ranking Indices*, 2001. [www.ips.org.sg/pub/Others\\_Asean%209+1%20indices.pdf](http://www.ips.org.sg/pub/Others_Asean%209+1%20indices.pdf) (diakses tanggal 2 April 2008).

<sup>128</sup> Hadi Soesastro, op.cit.

## II.5.2. Strategi Regional dalam Menghadapi Dominasi Ekonomi China

Apabila berjalan sesuai rencana, ACFTA akan lebih dulu terealisasi sebelum Pasar Tunggal ASEAN. Kondisi tersebut mencerminkan situasi yang kurang ideal, karena sistem ekonomi-politik ASEAN saat ini masih terpecah belah dan masih banyak diwarnai oleh friksi-friksi politik antar anggotanya. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah dominasi China di kawasan Asia Tenggara, dorongan untuk merealisasikan integrasi ekonomi regional semakin menguat. Sifat perdagangan ASEAN-China yang bersifat non-komplementer dan produk-produk China yang lebih kompetitif di pasar internasional dikhawatirkan dapat memperkuat pengaruh China di kawasan dan mengurangi daya tawar ASEAN di level internasional. Kurangnya *political will* negara-negara ASEAN untuk mewujudkan integrasi regional secara menyeluruh, serta ketidakhadiran institusi supranasional di ASEAN merupakan permasalahan utama yang menghambat kemajuan proses integrasi ekonomi.

Para anggota ASEAN menyadari bahwa untuk menghadapi sesama negara ASEAN, integrasi ekonomi mungkin tidak perlu menjadi prioritas utama, karena sifat perdagangan intra-kawasan yang bersifat non-komplementer. Namun dalam menghadapi China, negara-negara ASEAN tidak dapat berdiri sendiri. Banjir produk impor dari China sudah menjadi keseharian, bukan hanya di Indonesia, namun juga di negara-negara lainnya di kawasan. Pada dasarnya, hubungan perdagangan yang saling kompetitif mengindikasikan bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh kedua belah pihak dapat saling mensubstitusi satu sama lain.<sup>129</sup> Hal tersebut dapat pula berlaku dalam menganalisis hubungan perdagangan intra-ASEAN maupun ASEAN-China. Dalam menghadapi China, pihak ASEAN juga perlu menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat dilaksanakan secara regional untuk menandingi kapabilitas dan produktifitas China. Menjawab tantangan tersebut, konsep *Regional Production Network* (RPN) perlu segera dikembangkan seiring dengan perkembangan wacana pasar tunggal ASEAN. RPN dapat meningkatkan produktifitas regional ASEAN melalui pembangunan jaringan produksi antar negara di kawasan dengan tetap melibatkan sektor UKM dan sektor usaha informal.

<sup>129</sup> Chi Hung Kwan. *The Effects of SARS on Asian Economies*. China in Transition, April 30, 2003. <http://www.rieti.go.jp/en/china/03050701.html> (diakses tanggal 7 Mei 2008).